Nama: MITHA PRAMESWARI

NPM: 2215011036

KELAS: D

Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di masa lalu tidak lepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, yang telah diterapkan oleh rezim Orde Baru, dimana pendidikan kewarganegaraan telah direkayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan melalui cara cara Indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan Pancasila, dimana banyak perilaku kalangan elite Orde Baru yang mengelola negara dengan penuh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Pemahaman demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya dikuasai dan dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Konflik yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh pihak-pihak yang terkait merasa memiliki kebebasan terhadap hak-hak fundamental seperti hak untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi. Demokrasi berkaitan dengan kebebasan berkarya serta kebebasan individu, dalam ruang civil society termasuk didalamnya, kebebasan untuk berkomunikasi. Demokrasi dibagi menjadi 2 macam yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung.

Menurut cendikiawan Nurcholish Madjid, ada enam norma pokok yang dibutuhkan untuk tatanan masyarakat yang demokratis

- 1. Kesadaran akan pluralisme
- 2. Musyawarah
- 3. Cara-cara yang sesuai tujuan
- 4. Norma kejujuran dalam

pemufakatan

- 5. Kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban
- 6. Percobaan dan kesalahan

Pengertian Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya tidak ada seorang pun yang dapat merenggut hak asasi tersebut.

Terdapat 4 prinsip dalam HAM, yaitu:

- 1. Kebebasan
- 2. Kemerdekaan
- 3. Persamaan, serta
- 4. Keadilan

Tujuan Duham:

a) sebagai tolak ukur (standar umum) prestasi bersama semua rakyat dan semua

bangsa;

- b) sebagai pengumuman resmi kepada semua negara anggota PBB dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang terkandung di dalam DUHAM;
- c) meskipun DUHAM bukanlah sebagai "convention" atau "covenant" (perjanjian internasional) namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban untuk menerapkannya.